



BUPATI BANGKA BARAT  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT  
NOMOR 94 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 78  
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

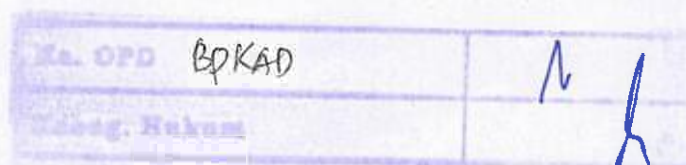
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodir penyesuaian pada Pendapatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penambahan belanja pada program dan kegiatan/sub kegiatan SKPD, penyesuaian Belanja Pegawai dan pergeseran anggaran SKPD yang dianggap strategis dan mendesak untuk segera dilaksanakan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

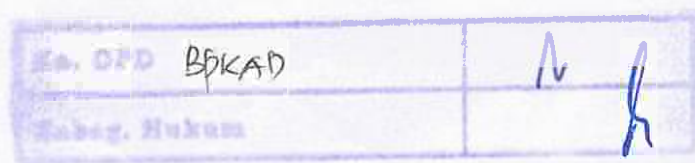
Ka. OPD	SpKAD		
Kab. Bangka Barat			

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

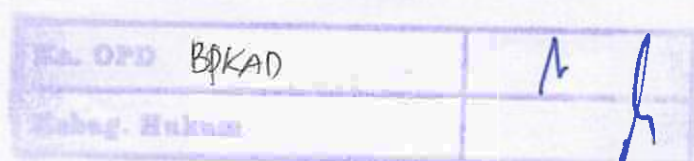




10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat





(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor 4 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor 2 Seri A);
25. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 9 Seri A);

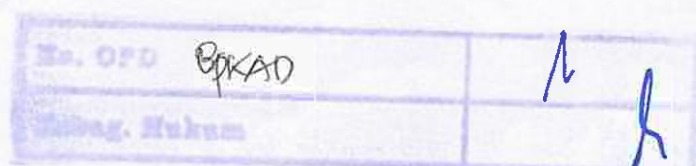
#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 78 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal

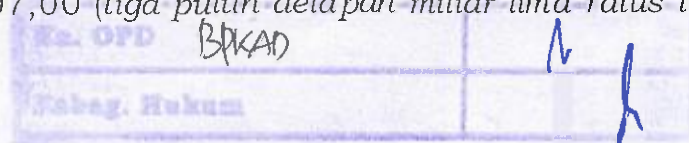
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 93 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 10 Seri A) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:



### Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sebesar Rp369.302.167.723,00 (*tiga ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus dua juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah*) berkurang sebesar Rp7.756.456.821,00 (*tujuh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah*) dari semula sebesar Rp377.058.624.544,00 (*tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BOS.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp199.108.161.052,00 (*seratus sembilan puluh sembilan miliar seratus delapan juta seratus enam puluh satu ribu lima puluh dua rupiah*) bertambah sebesar Rp960.625.672,00 (*sembilan ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah*) dari semula sebesar Rp198.147.535.380,00 (*seratus sembilan puluh delapan miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp110.952.741.977,00 (*seratus sepuluh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) berkurang sebesar Rp9.266.453.118,00 (*sembilan miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah*) dari semula sebesar Rp120.219.195.095,00 (*seratus dua puluh miliar dua ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan puluh lima rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.515.013.907,00 (*tiga puluh delapan miliar lima ratus lima belas juta tiga*





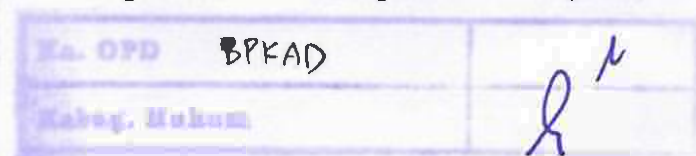
*belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp215.785.958,00 (dua ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) dari semula sebesar Rp38.730.799.865,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).*

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.798.400.000,00 (*tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp400,00 (*empat ratus rupiah*) dari semula sebesar Rp13.798.399.600,00 (*tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp609.210.787,00 (*enam ratus sembilan juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah*) berkurang sebesar Rp27.439.917,00 (*dua puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah*) dari semula sebesar Rp636.650.704,00 (*enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp601.600.000,00 (*enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp400,00 (*empat ratus rupiah*) dari semula sebesar Rp601.600.400,00 (*enam ratus satu juta enam ratus ribu empat ratus rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.717.040.000,00 (*lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta empat puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp792.596.500,00 (*tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah*) dari semula sebesar Rp4.924.443.500,00 (*empat miliar sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah*).

2. Ketentuan pada Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) direncanakan sebesar Rp384.712.061.158,00 (*tiga ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus dua belas enam puluh satu ribu seratus lima puluh delapan rupiah*) bertambah



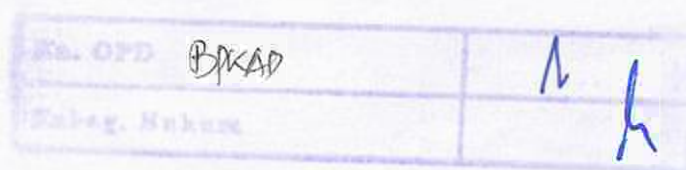
sebesar Rp51.576.101.307,00 (*lima puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh enam juta seratus satu ribu tiga ratus tujuh rupiah*) dari semula sebesar Rp333.135.959.851,00 (*tiga ratus tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.663.213.649,00 (*enam puluh satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah*) bertambah sebesar Rp9.977.057.613,00 (*sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga belas rupiah*) dari semula sebesar Rp51.686.156.036,00 (*lima puluh satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh enam ribu tiga puluh enam rupiah*).

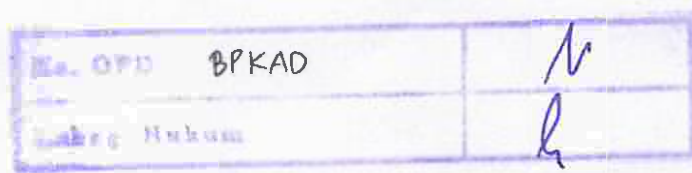
(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp196.906.089.994,00 (*seratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus enam juta delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp16.004.711.900,00 (*enam belas miliar empat juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah*) dari semula sebesar Rp180.901.378.094,00 (*seratus delapan puluh miliar sembilan ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh empat rupiah*).

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.915.083.922,00 (*enam belas miliar sembilan ratus lima belas juta delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah*) bertambah sebesar Rp5.423.882.495,00 (*lima miliar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*) dari semula sebesar Rp11.491.201.427,00 (*sebelas miliar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah*).





- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.275.267.894,00 (*lima puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp6.120.750.112,00 (*enam miliar seratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus dua belas rupiah*) dari semula sebesar Rp47.154.517.782,00 (*empat puluh tujuh miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.211.239.916,00 (*tiga belas miliar dua ratus sebelas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah*) bertambah sebesar Rp6.180.554.615,00 (*enam miliar seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah*) dari semula sebesar Rp7.030.685.301,00 (*tujuh miliar tiga puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus satu rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.126.364.133,00 (*sembilan belas miliar seratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah*) berkurang sebesar Rp551.712.078,00 (*lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh puluh delapan rupiah*) dari semula sebesar Rp19.678.076.211,00 (*sembilan belas miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp23.614.801.650,00 (*dua puluh tiga miliar enam ratus empat belas juta delapan ratus satu ribu enam ratus lima puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp8.420.856.650,00 (*delapan miliar empat ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah*) dari semula sebesar Rp15.193.945.000,00 (*lima belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah*).




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

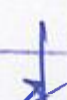
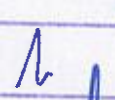




Ditetapkan di Mentok  
pada tanggal 4 Desember 2023  
BUPATI BANGKA BARAT,

  
SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok  
pada tanggal 4 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,

  
MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 12 SERI A

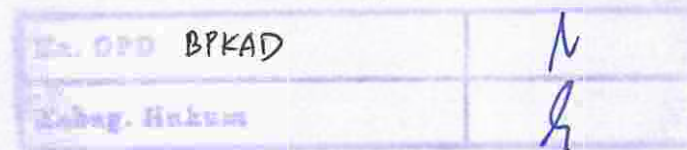
Daftar Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Ka. OPD BPKAD	
Kabag. Hukum	
Sekretaris OPD BPKAD	
Kabid. ANGGARAN	
Penyusunan PUP	



Lampiran I : Peraturan Bupati Bangka Barat  
 Nomor : 94 Tahun 2023  
 Tanggal : 04 Desember 2023  
 Tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

**RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD SETELAH PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>70.265.927.500</b>	<b>73.406.243.465</b>	<b>3.140.315.965</b>	<b>104,47 %</b>
<b>4.1.01</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>29.156.787.500</b>	<b>29.156.787.500</b>	-	<b>100,00 %</b>
<b>4.1.01.06</b>	<b>Pajak Hotel</b>	<b>105.787.500</b>	<b>105.787.500</b>	-	<b>100,00 %</b>
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	105.787.500	105.787.500	-	100,00 %
<b>4.1.01.07</b>	<b>Pajak Restoran</b>	<b>2.961.000.000</b>	<b>2.961.000.000</b>	-	<b>100,00 %</b>
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	-	2.961.000.000	2.961.000.000	100,00 %
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.961.000.000	0	(2.961.000.000)	0,00 %
<b>4.1.01.08</b>	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>70.000.000</b>	<b>70.000.000</b>	-	<b>100,00 %</b>
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	-	70.000.000	70.000.000	100,00 %
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	70.000.000	0	(70.000.000)	0,00 %
<b>4.1.01.09</b>	<b>Pajak Reklame</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	-	<b>100,00 %</b>
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	500.000.000	500.000.000	-	100,00 %
<b>4.1.01.10</b>	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	-	<b>100,00 %</b>
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	15.000.000.000	15.000.000.000	-	100,00 %
<b>4.1.01.11</b>	<b>Pajak Parkir</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	-	<b>100,00 %</b>
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	20.000.000	20.000.000	-	100,00 %



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
<b>4.1.01.12</b>	<b>Pajak Air Tanah</b>	<b>250.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	-	<b>100,00 %</b>
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	250.000.000	250.000.000	-	100,00 %
<b>4.1.01.13</b>	<b>Pajak Sarang Burung Walet</b>	<b>800.000.000</b>	<b>800.000.000</b>	-	<b>100,00 %</b>
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	800.000.000	800.000.000	-	100,00 %
<b>4.1.01.14</b>	<b>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	-	<b>100,00 %</b>
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.500.000.000	1.500.000.000	-	100,00 %
<b>4.1.01.15</b>	<b>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)</b>	<b>6.300.000.000</b>	<b>6.300.000.000</b>	-	<b>100,00 %</b>
4.1.01.15.01	PBBP2	6.300.000.000	6.300.000.000	-	100,00 %
<b>4.1.01.16</b>	<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b>	<b>1.650.000.000</b>	<b>1.650.000.000</b>	-	<b>100,00 %</b>
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	-	650.000.000	650.000.000	100,00 %
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.650.000.000	1.000.000.000	(650.000.000)	60,61 %
<b>4.1.02</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>7.709.140.000</b>	<b>8.127.500.000</b>	<b>418.360.000</b>	<b>105,43 %</b>
<b>4.1.02.01</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>4.225.000.000</b>	<b>5.293.360.000</b>	<b>1.068.360.000</b>	<b>125,29 %</b>
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.000.000.000	2.942.360.000	942.360.000	147,12 %
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.200.000.000	1.206.000.000	6.000.000	100,50 %
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	120.000.000	120.000.000	-	100,00 %
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	50.000.000	70.000.000	20.000.000	140,00 %
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000	100.000.000	(100.000.000)	50,00 %
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	125.000.000	125.000.000	-	100,00 %
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	30.000.000	230.000.000	200.000.000	766,67 %
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000	500.000.000	-	100,00 %
<b>4.1.02.02</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>3.167.140.000</b>	<b>2.547.140.000</b>	<b>(620.000.000)</b>	<b>80,42 %</b>
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000.000	100.000.000	-	100,00 %
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	325.000.000	325.000.000	-	100,00 %
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	100.000.000	100.000.000	-	100,00 %
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	267.140.000	167.140.000	(100.000.000)	62,57 %
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.900.000.000	1.200.000.000	(700.000.000)	63,16 %
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)	50,00 %
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	350.000.000	580.000.000	230.000.000	165,71 %
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	25.000.000	25.000.000	-	100,00 %



Kode	Uraian	J u m l a h (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)	%
		Se belum Perubahan	Setelah Pe ru bahan		
<b>4.1.02.03</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>317.000.000</b>	<b>287.000.000</b>	<b>(30.000.000)</b>	<b>90,54 %</b>
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	250.000.000	250.000.000	-	100,00 %
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.000.000	2.000.000	-	100,00 %
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	5.000.000	5.000.000	-	100,00 %
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	60.000.000	30.000.000	(30.000.000)	50,00 %
<b>4.1.03</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>3.900.000.000</b>	<b>9.850.000.000</b>	<b>5.950.000.000</b>	<b>252,56 %</b>
<b>4.1.03.02</b>	<b>Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD</b>	<b>3.900.000.000</b>	<b>9.850.000.000</b>	<b>5.950.000.000</b>	<b>252,56 %</b>
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.900.000.000	9.850.000.000	5.950.000.000	252,56 %
<b>4.1.04</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>29.500.000.000</b>	<b>26.271.955.965</b>	<b>(3.228.044.035)</b>	<b>89,06 %</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipsahkan</b>	<b>250.000.000</b>	<b>700.000.000</b>	<b>450.000.000</b>	<b>280,00 %</b>
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	250.000.000	700.000.000	450.000.000	280,00 %
<b>4.1.04.03</b>	<b>Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipsahkan</b>	<b>-</b>	<b>99.000.000</b>	<b>99.000.000</b>	<b>100,00 %</b>
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	-	99.000.000	99.000.000	100,00 %
<b>4.1.04.05</b>	<b>Jasa Giro</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>-</b>	<b>100,00 %</b>
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	-	100,00 %
<b>4.1.04.07</b>	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>(1.000.000.000)</b>	<b>71,43 %</b>
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.500.000.000	2.500.000.000	(1.000.000.000)	71,43 %
<b>4.1.04.11</b>	<b>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>100,00 %</b>
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000.000	1.000.000.000	-	100,00 %
<b>4.1.04.12</b>	<b>Pendapatan Denda Pajak Daerah</b>	<b>250.000.000</b>	<b>640.000.000</b>	<b>390.000.000</b>	<b>256,00 %</b>
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	4.500.000	100.000.000	95.500.000	2222,22 %
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	66.000.000	200.000.000	134.000.000	303,03 %
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	35.000.000	35.000.000	-	100,00 %
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	45.000.000	50.000.000	5.000.000	111,11 %

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	97.000.000	250.000.000	153.000.000	257,73 %
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000	5.000.000	2.500.000	200,00 %
<b>4.1.04.15</b>	<b>Pendapatan dari Pengembalian</b>	<b>250.000.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>-</b>	<b>100,00 %</b>
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	250.000.000	250.000.000	-	100,00 %
<b>4.1.04.16</b>	<b>Pendapatan BLUD</b>	<b>22.500.000.000</b>	<b>16.057.034.381</b>	<b>(6.442.965.619)</b>	<b>71,36 %</b>
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	22.500.000.000	16.057.034.381	(6.442.965.619)	71,36 %
<b>4.1.04.21</b>	<b>Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah</b>	<b>250.000.000</b>	<b>3.525.921.583</b>	<b>3.275.921.583</b>	<b>1410,37 %</b>
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	250.000.000	3.525.921.583	3.275.921.583	1410,37 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>808.384.418.000</b>	<b>914.736.678.455</b>	<b>106.352.260.455</b>	<b>113,16 %</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>766.384.418.000</b>	<b>809.772.304.000</b>	<b>43.387.886.000</b>	<b>105,66 %</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>692.644.695.000</b>	<b>728.380.615.000</b>	<b>35.735.920.000</b>	<b>105,16 %</b>
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	103.917.963.000	139.653.883.000	35.735.920.000	134,39 %
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	435.286.031.000	435.286.031.000	-	100,00 %
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	53.585.059.000	53.585.059.000	-	100,00 %
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	99.855.642.000	99.855.642.000	-	100,00 %
<b>4.2.01.02</b>	<b>Dana Insentif Daerah (DID)</b>	<b>21.120.347.000</b>	<b>26.956.967.000</b>	<b>5.836.620.000</b>	<b>127,64 %</b>
4.2.01.02.01	DID	21.120.347.000	26.956.967.000	5.836.620.000	127,64 %
<b>4.2.01.05</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>52.619.376.000</b>	<b>54.434.722.000</b>	<b>1.815.346.000</b>	<b>103,45 %</b>
4.2.01.05.01	Dana Desa	52.619.376.000	54.434.722.000	1.815.346.000	103,45 %
<b>4.2.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>42.000.000.000</b>	<b>104.964.374.455</b>	<b>62.964.374.455</b>	<b>249,92 %</b>
<b>4.2.02.01</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil</b>	<b>42.000.000.000</b>	<b>69.052.810.805</b>	<b>27.052.810.805</b>	<b>164,41 %</b>
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	42.000.000.000	69.052.810.805	27.052.810.805	164,41 %
<b>4.2.02.02</b>	<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>-</b>	<b>35.911.563.650</b>	<b>35.911.563.650</b>	<b>100,00 %</b>
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	35.911.563.650	35.911.563.650	100,00 %
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>11.500.000.000</b>	<b>11.125.000.000</b>	<b>(375.000.000)</b>	<b>96,74 %</b>
<b>4.3.01</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>-</b>	<b>100,00 %</b>
<b>4.3.01.01</b>	<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>-</b>	<b>100,00 %</b>
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	500.000.000	500.000.000	-	100,00 %



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.000.000.000	10.625.000.000	(375.000.000)	96,59 %
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.000.000.000	10.625.000.000	(375.000.000)	96,59 %
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.000.000.000	10.625.000.000	(375.000.000)	96,59 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>890.150.345.500</b>	<b>999.267.921.919</b>	<b>109.117.576.419</b>	<b>112,26 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>			<b>0</b>	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>745.288.747.873</b>	<b>803.547.706.878</b>	<b>58.258.959.005</b>	<b>107,82 %</b>
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>377.058.624.544</b>	<b>369.302.167.723</b>	<b>(7.756.456.821)</b>	<b>97,94 %</b>
5.1.01.01	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>198.147.535.380</b>	<b>199.108.161.052</b>	<b>960.625.672</b>	<b>100,48 %</b>
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	138.638.354.620	139.768.683.271	1.130.328.651	100,82 %
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	14.198.966.623	13.737.088.476	(461.878.147)	96,75 %
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.690.707.000	5.027.252.775	(663.454.225)	88,34 %
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.012.334.850	10.579.703.620	(432.631.230)	96,07 %
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.365.489.100	1.818.365.525	(547.123.575)	76,87 %
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	9.403.955.934	8.753.583.001	(650.372.933)	93,08 %
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	383.194.133	232.928.087	(150.266.046)	60,79 %
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.475.414	34.223.218	28.747.804	625,03 %
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.510.557.785	15.258.919.424	4.748.361.639	145,18 %
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	484.239.545	346.856.681	(137.382.864)	71,63 %
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.156.185.139	915.666.209	(240.518.930)	79,20 %
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	4.298.075.237	2.634.890.765	(1.663.184.472)	61,30 %
5.1.01.02	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>120.219.195.095</b>	<b>110.952.741.977</b>	<b>(9.266.453.118)</b>	<b>92,29 %</b>
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	36.311.702.670	33.223.563.052	(3.088.139.618)	91,50 %
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	21.783.656.225	21.782.261.625	(1.394.600)	99,99 %
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	6.730.530.000	7.052.126.400	321.596.400	104,78 %
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	55.393.306.200	48.894.790.900	(6.498.515.300)	88,27 %
5.1.01.03	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>38.730.799.865</b>	<b>38.515.013.907</b>	<b>(215.785.958)</b>	<b>99,44 %</b>
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	967.753.625	760.264.125	(207.489.500)	78,56 %

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	195.695.240	264.123.782	68.428.542	134,97 %
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	35.245.211.000	35.245.211.000	-	100,00 %
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	871.500.000	871.500.000	-	100,00 %
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.343.135.000	1.343.135.000	-	100,00 %
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	107.505.000	30.780.000	(76.725.000)	28,63 %
<b>5.1.01.04</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD</b>	<b>13.798.399.600</b>	<b>13.798.400.000</b>	<b>400</b>	<b>100,00 %</b>
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000	561.540.000	-	100,00 %
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600	78.615.600	-	100,00 %
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	86.904.000	86.904.000	-	100,00 %
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	48.132.000	48.132.000	-	100,00 %
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000	814.233.000	-	100,00 %
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	82.580.400	82.580.400	-	100,00 %
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	177.584.000	177.584.400	400	100,00 %
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.180.000.000	3.180.000.000	-	100,00 %
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000	787.500.000	-	100,00 %
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	2.800.000	2.800.000	-	100,00 %
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	70.000	70.000	-	100,00 %
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.330.435.600	3.330.435.600	-	100,00 %
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.608.000.000	4.608.000.000	-	100,00 %
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	40.005.000	40.005.000	-	100,00 %
<b>5.1.01.05</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH</b>	<b>636.650.704</b>	<b>609.210.787</b>	<b>(27.439.917)</b>	<b>95,69 %</b>
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	66.500.000	64.500.000	(2.000.000)	96,99 %
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.800.000	9.800.000	-	100,00 %
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.000.000	99.000.000	-	100,00 %
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.500.000	10.500.000	-	100,00 %



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.000.000	5.000.000	-	100,00 %
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	200.000	200.000	-	100,00 %
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	101.000.000	103.000.000	2.000.000	101,98 %
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	2.000.000	2.000.000	-	100,00 %
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	2.000.000	2.000.000	-	100,00 %
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	269.088.944	211.607.694	(57.481.250)	78,64 %
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	71.561.760	101.603.093	30.041.333	141,98 %
<b>5.1.01.06</b>	<b>Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH</b>	<b>601.600.400</b>	<b>601.600.000</b>	<b>(400)</b>	<b>100,00 %</b>
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.400	201.600.000	(400)	100,00 %
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000	400.000.000	-	100,00 %
<b>5.1.01.88</b>	<b>Belanja Pegawai BOS</b>	<b>4.924.443.500</b>	<b>5.717.040.000</b>	<b>792.596.500</b>	<b>116,10 %</b>
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	4.924.443.500	5.717.040.000	792.596.500	116,10 %
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>333.135.959.851</b>	<b>384.712.061.158</b>	<b>51.576.101.307</b>	<b>115,48 %</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>51.686.156.036</b>	<b>61.663.213.649</b>	<b>9.977.057.613</b>	<b>119,30 %</b>
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	51.618.195.036	61.564.252.649	9.946.057.613	119,27 %
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	67.961.000	98.961.000	31.000.000	145,61 %
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>180.901.378.094</b>	<b>196.906.089.994</b>	<b>16.004.711.900</b>	<b>108,85 %</b>
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	125.502.718.610	143.255.090.987	17.752.372.377	114,15 %
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	36.884.240.900	35.311.029.700	(1.573.211.200)	95,73 %
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	127.200.000	95.550.000	(31.650.000)	75,12 %
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.285.566.225	6.197.520.260	(1.088.045.965)	85,07 %
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.744.615.000	2.520.620.600	(223.994.400)	91,84 %
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	260.400.000	1.000.000	(259.400.000)	0,38 %
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	-	233.604.000	233.604.000	100,00 %
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.484.861.553	3.882.548.803	1.397.687.250	156,25 %
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.770.181.000	2.561.609.000	(208.572.000)	92,47 %
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	18.000.000	56.000.000	38.000.000	311,11 %
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	120.000.000	0	(120.000.000)	0,00 %

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.100.523.000	2.266.049.400	165.526.400	107,88 %
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	559.121.806	485.967.556	(73.154.250)	86,92 %
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	43.950.000	39.499.688	(4.450.312)	89,87 %
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>11.491.201.427</b>	<b>16.915.083.922</b>	<b>5.423.882.495</b>	<b>147,20 %</b>
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	20.000.000	393.400.000	373.400.000	1967,00 %
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.894.172.700	2.111.001.988	216.829.288	111,45 %
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.386.740.666	8.651.332.351	4.264.591.685	197,22 %
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.166.970.061	5.736.031.583	569.061.522	111,01 %
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	23.318.000	23.318.000	-	100,00 %
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>47.154.517.782</b>	<b>53.275.267.894</b>	<b>6.120.750.112</b>	<b>112,98 %</b>
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	47.154.517.782	53.275.267.894	6.120.750.112	112,98 %
<b>5.1.02.05</b>	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>7.030.685.301</b>	<b>13.211.239.916</b>	<b>6.180.554.615</b>	<b>187,91 %</b>
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.665.008.800	8.522.547.450	4.857.538.650	232,54 %
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.365.676.501	4.688.692.466	1.323.015.965	139,31 %
<b>5.1.02.88</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BOS</b>	<b>19.678.076.211</b>	<b>19.126.364.133</b>	<b>(551.712.078)</b>	<b>97,20 %</b>
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	19.678.076.211	19.126.364.133	(551.712.078)	97,20 %
<b>5.1.02.99</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>	<b>15.193.945.000</b>	<b>23.614.801.650</b>	<b>8.420.856.650</b>	<b>155,42 %</b>
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	15.193.945.000	23.614.801.650	8.420.856.650	155,42 %
<b>5.1.05</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>30.722.321.478</b>	<b>45.556.047.997</b>	<b>14.833.726.519</b>	<b>148,28 %</b>
<b>5.1.05.01</b>	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat</b>	-	<b>642.964.000</b>	<b>642.964.000</b>	<b>100,00 %</b>
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	-	642.964.000	642.964.000	100,00 %
<b>5.1.05.02</b>	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya</b>	-	<b>7.358.074.000</b>	<b>7.358.074.000</b>	<b>100,00 %</b>
5.1.05.02.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	7.358.074.000	7.358.074.000	100,00 %



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
<b>5.1.05.05</b>	<b>Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>	<b>26.845.275.828</b>	<b>32.802.487.028</b>	<b>5.957.211.200</b>	<b>122,19 %</b>
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.355.180.000	13.913.831.200	11.558.651.200	590,78 %
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	715.421.178	709.921.178	(5.500.000)	99,23 %
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	14.624.674.650	9.028.734.650	(5.595.940.000)	61,74 %
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	9.150.000.000	9.150.000.000	-	100,00 %
<b>5.1.05.06</b>	<b>Belanja Hibah Dana BOS</b>	<b>2.432.260.650</b>	<b>3.307.737.969</b>	<b>875.477.319</b>	<b>135,99 %</b>
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	139.100.000	0	(139.100.000)	0,00 %
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.272.517.250	3.307.737.969	1.035.220.719	145,55 %
5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	20.643.400	0	(20.643.400)	0,00 %
<b>5.1.05.07</b>	<b>Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</b>	<b>1.444.785.000</b>	<b>1.444.785.000</b>	<b>-</b>	<b>100,00 %</b>
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.444.785.000	1.444.785.000	-	100,00 %
<b>5.1.06</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>4.371.842.000</b>	<b>3.977.430.000</b>	<b>(394.412.000)</b>	<b>90,98 %</b>
<b>5.1.06.01</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Individu</b>	<b>4.075.392.000</b>	<b>3.777.230.000</b>	<b>(298.162.000)</b>	<b>92,68 %</b>
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.262.000.000	3.232.850.000	970.850.000	142,92 %
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.813.392.000	544.380.000	(1.269.012.000)	30,02 %
<b>5.1.06.02</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga</b>	<b>200.200.000</b>	<b>200.200.000</b>	<b>-</b>	<b>100,00 %</b>
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	200.200.000	200.200.000	-	100,00 %

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
<b>5.1.06.04</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)</b>	<b>96.250.000</b>	<b>0</b>	<b>(96.250.000)</b>	<b>0,00 %</b>
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	96.250.000	0	(96.250.000)	0,00 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>160.546.735.909</b>	<b>182.196.135.162</b>	<b>21.649.399.253</b>	<b>113,48 %</b>
<b>5.2.01</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>	<b>2.700.000.000</b>	<b>2.700.000.000</b>	<b>-</b>	<b>100,00 %</b>
<b>5.2.01.01</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>	<b>2.700.000.000</b>	<b>2.700.000.000</b>	<b>-</b>	<b>100,00 %</b>
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	2.700.000.000	2.700.000.000	-	100,00 %
<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>27.271.815.039</b>	<b>33.357.947.316</b>	<b>6.086.132.277</b>	<b>122,32 %</b>
<b>5.2.02.01</b>	<b>Belanja Modal Alat Besar</b>	<b>-</b>	<b>270.400.001</b>	<b>270.400.001</b>	<b>100,00 %</b>
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	-	270.400.001	270.400.001	100,00 %
<b>5.2.02.02</b>	<b>Belanja Modal Alat Angkutan</b>	<b>1.864.933.000</b>	<b>1.864.933.000</b>	<b>-</b>	<b>100,00 %</b>
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.864.933.000	1.864.933.000	-	100,00 %
<b>5.2.02.03</b>	<b>Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	<b>49.017.500</b>	<b>49.017.500</b>	<b>-</b>	<b>100,00 %</b>
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	49.017.500	49.017.500	-	100,00 %
<b>5.2.02.05</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>1.216.893.600</b>	<b>4.498.758.638</b>	<b>3.281.865.038</b>	<b>100,00 %</b>
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	571.339.000	2.021.479.000	1.450.140.000	100,00 %
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	500.757.900	2.341.661.438	1.840.903.538	100,00 %
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	144.796.700	135.618.200	(9.178.500)	100,00 %
<b>5.2.02.06</b>	<b>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	<b>67.850.400</b>	<b>576.680.400</b>	<b>508.830.000</b>	<b>100,00 %</b>
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	67.850.400	392.780.400	324.930.000	100,00 %
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	-	49.200.000	49.200.000	100,00 %
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	-	134.700.000	134.700.000	100,00 %
<b>5.2.02.07</b>	<b>Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>	<b>12.509.586.910</b>	<b>12.272.872.910</b>	<b>(236.714.000)</b>	<b>100,00 %</b>
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	12.468.872.910	12.238.522.910	(230.350.000)	100,00 %
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	40.714.000	34.350.000	(6.364.000)	100,00 %
<b>5.2.02.08</b>	<b>Belanja Modal Alat Laboratorium</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-</b>	<b>100,00 %</b>
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	10.000.000	10.000.000	-	100,00 %
<b>5.2.02.10</b>	<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>1.685.480.000</b>	<b>3.310.991.054</b>	<b>1.625.511.054</b>	<b>100,00 %</b>



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.672.980.000	2.696.969.997	1.023.989.997	100,00 %
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.500.000	614.021.057	601.521.057	100,00 %
<b>5.2.02.11</b>	<b>Belanja Modal Alat Eksplorasi</b>	-	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,00 %</b>
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	-	10.000.000	10.000.000	100,00 %
<b>5.2.02.13</b>	<b>Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian</b>	<b>271.696.090</b>	<b>696.246.090</b>	<b>424.550.000</b>	<b>100,00 %</b>
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	271.696.090	696.246.090	424.550.000	100,00 %
<b>5.2.02.14</b>	<b>Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi</b>	-	<b>672.000.000</b>	<b>672.000.000</b>	<b>100,00 %</b>
5.2.02.14.01	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	-	672.000.000	672.000.000	100,00 %
<b>5.2.02.15</b>	<b>Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja</b>	-	<b>7.800.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>100,00 %</b>
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	-	4.800.000	4.800.000	100,00 %
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	-	3.000.000	3.000.000	100,00 %
<b>5.2.02.16</b>	<b>Belanja Modal Alat Peraga</b>	<b>10.000.000</b>	<b>63.100.000</b>	<b>53.100.000</b>	<b>100,00 %</b>
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10.000.000	63.100.000	53.100.000	100,00 %
<b>5.2.02.17</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi</b>	<b>1.485.620.000</b>	<b>1.485.620.000</b>	-	<b>100,00 %</b>
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	1.485.620.000	1.485.620.000	-	100,00 %
<b>5.2.02.19</b>	<b>Belanja Modal Peralatan Olahraga</b>	<b>2.672.500.000</b>	<b>4.208.600.500</b>	<b>1.536.100.500</b>	<b>100,00 %</b>
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	2.672.500.000	4.208.600.500	1.536.100.500	100,00 %
<b>5.2.02.88</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS</b>	<b>5.428.237.539</b>	<b>3.360.927.223</b>	<b>(2.067.310.316)</b>	<b>100,00 %</b>
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.428.237.539	3.360.927.223	(2.067.310.316)	100,00 %
<b>5.2.03</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>52.744.680.000</b>	<b>68.590.771.000</b>	<b>15.846.091.000</b>	<b>100,00 %</b>
<b>5.2.03.01</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>	<b>51.834.590.000</b>	<b>67.449.969.000</b>	<b>15.615.379.000</b>	<b>100,00 %</b>
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	51.834.590.000	66.789.563.000	14.954.973.000	100,00 %
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	660.406.000	660.406.000	100,00 %
<b>5.2.03.04</b>	<b>Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>	<b>910.090.000</b>	<b>1.140.802.000</b>	<b>230.712.000</b>	<b>100,00 %</b>
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	910.090.000	1.140.802.000	230.712.000	100,00 %
<b>5.2.04</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>76.072.490.370</b>	<b>73.018.630.372</b>	<b>(3.053.859.998)</b>	<b>100,00 %</b>
<b>5.2.04.01</b>	<b>Belanja Modal Jalan dan Jembatan</b>	<b>73.095.961.370</b>	<b>69.352.501.370</b>	<b>(3.743.460.000)</b>	<b>100,00 %</b>
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	73.035.456.370	69.291.996.370	(3.743.460.000)	100,00 %
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	60.505.000	60.505.000	-	100,00 %
<b>5.2.04.02</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Air</b>	<b>85.000.000</b>	<b>85.000.000</b>	-	<b>100,00 %</b>
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	85.000.000	85.000.000	-	100,00 %
<b>5.2.04.03</b>	<b>Belanja Modal Instalasi</b>	<b>1.774.779.000</b>	<b>2.460.279.002</b>	<b>685.500.002</b>	<b>100,00 %</b>

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	106.539.775.400	111.928.713.400	5.388.938.000	105,06 %
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.990.000.000	1.990.000.000	-	100,00 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.022.156.851.932</b>	<b>1.106.559.723.690</b>	<b>84.402.871.758</b>	<b>108,26 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>- 132.006.506.432</b>	<b>-107.291.801.771</b>	<b>24.714.704.661</b>	<b>81,28 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			<b>-</b>	<b>0,00 %</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>132.006.506.432</b>	<b>107.291.801.771</b>	<b>(24.714.704.661)</b>	<b>81,28 %</b>
<b>6.1.01</b>	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>	<b>131.906.506.432</b>	<b>107.191.801.771</b>	<b>(24.714.704.661)</b>	<b>81,26 %</b>
<b>6.1.01.05</b>	<b>Penghematan Belanja</b>	<b>131.906.506.432</b>	<b>107.191.801.771</b>	<b>(24.714.704.661)</b>	<b>81,26 %</b>
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	131.906.506.432	107.191.801.771	(24.714.704.661)	81,26 %
<b>6.1.05</b>	<b>Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>-</b>	<b>100,00 %</b>
<b>6.1.05.06</b>	<b>Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>-</b>	<b>100,00 %</b>
6.1.05.06.01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	100.000.000	100.000.000	-	100,00 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>132.006.506.432</b>	<b>107.291.801.771</b>	<b>(24.714.704.661)</b>	<b>81,28 %</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00 %</b>
<b>6.2.02</b>	<b>Penyertaan Modal Daerah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00 %</b>
<b>6.2.02.02</b>	<b>Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00 %</b>
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	-	-	-	0,00 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00 %</b>
	Pembiayaan Netto	132.006.506.432	107.291.801.771	(24.714.704.661)	81,28 %
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembelian Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00 %</b>

Kabag. Hukum

Sekretaris OPD BPKAD

Kabid. ANGGARAN

Perancang PU

BUPATIBANGKA BARAT,

SUKIRMAN



Lampiran II : Peraturan Bupati Bangka Barat  
 Nomor : 94 Tahun 2023  
 Tanggal : 04 Desember 2023  
 Tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

**KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN**  
**OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
						<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>890.150.345.500</b>	<b>999.267.921.919</b>	<b>109.117.576.419</b>		
						<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.022.156.851.932</b>	<b>1.106.559.723.690</b>	<b>84.402.871.758</b>		
						<b>1.01.2.19.0.00.02 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat</b>					
1	1	1.01.2.19.0.00.02.	1	00.00	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	174.092.935.000	172.629.249.170	-1.463.685.830		
1	1	1.01.2.19.0.00.02.	1	02.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	171.740.900.000	168.633.784.170	-3.107.115.830		
1	1	1.01.2.19.0.00.02.0	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	171.740.000.000	168.632.884.170	-3.107.115.830		pergeseran kode rekening belanja
						<b>Jumlah Belanja</b>	<b>290.581.750.000</b>	<b>303.991.654.670</b>	<b>13.409.904.670</b>		
						<b>1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat</b>					
1	2	1.02.0.00.0.00.01.	1	00.00	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	85.299.119.350	84.795.671.600	-503.447.750		
1	2	1.02.0.00.0.00.01.	1	02.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	77.819.103.350	76.660.725.600	-1.158.377.750		

BPKAD  
 Subag. Hukum  
 2

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	77.818.203.350	76.659.825.600	-1.158.377.750		pergeseran kode rekening belanja
						Jumlah Belanja	162.334.776.840	161.998.950.445	-335.826.395		
		1.04.2.15.1.04.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat									
1	4	1.04.2.15.1.04.01.	1	00.00	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.816.805.000	6.206.014.000	389.209.000		
1	4	1.04.2.15.1.04.01.	1	02.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.430.900.000	3.479.249.000	48.349.000		
1	4	1.04.2.15.1.04.01.0	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.430.000.000	3.478.349.000	48.349.000		pergeseran kode rekening belanja
						Jumlah Belanja	18.099.830.570	21.838.499.570	3.738.669.000		
		1.05.0.00.0.00.05.0000 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka Barat									
1	5	1.05.0.00.0.00.01.	2	00.00	0	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.368.470.000	5.187.434.000	818.964.000		
1	5	1.05.0.00.0.00.01.	2	02.01	0	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.294.255.000	5.113.219.000	818.964.000		
1	5	1.05.0.00.0.00.01.0	2	02.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan	224.810.000	1.043.774.000	818.964.000		pergeseran kode rekening belanja
						Jumlah Belanja	10.116.087.000	10.611.297.500	495.210.500		
		1.06.2.13.0.00.05.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat									
1	6	1.06.2.13.0.00.05.	1	00.00	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.485.135.000	5.758.533.000	273.398.000		

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
1	6	1.06.2.13.0.00.05.	1	02.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.100.900.000	3.830.724.000	-270.176.000		
1	6	1.06.2.13.0.00.05.0	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.100.000.000	3.829.824.000	-270.176.000		pergeseran kode rekening belanja
						Jumlah Belanja	9.995.795.000	10.259.890.500	264.095.500		
2.07.2.18.3.32.22 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat											
2	7	2.07.2.18.3.32.22.	1	00.00	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.811.710.000	4.717.711.560	-93.998.440		
2	7	2.07.2.18.3.32.22.	1	02.08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	771.510.000	771.510.000	0		
2	7	2.07.2.18.3.32.22.0	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.600.000	78.600.000	0		pergeseran kode rekening belanja
						Jumlah Belanja	6.024.664.560	5.921.282.560	-103.382.000		
2.16.2.20.2 21.03.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Barat											
2	16	2.16.2.20.2.21.03.	1	00.00	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.999.200.000	3.660.572.000	-338.628.000		
2	16	2.16.2.20.2.21.03.	1	02.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.725.900.000	2.244.172.000	-481.728.000		
2	##	2.16.2.20.2.21.03.0	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.725.000.000	2.243.272.000	-481.728.000		pergeseran kode rekening belanja
						Jumlah Belanja	7.091.869.000	7.400.041.000	308.172.000		
5.02.0.00.0.00.03 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat											



Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
5	2	5.02.0.00.0.00.03.	1	00.00	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.532.080.000	7.528.151.875	-3.928.125		
5	2	5.02.0.00.0.00.03.	1	02.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.485.900.000	5.336.971.875	-148.928.125		
5	2	5.02.0.00.0.00.03.0	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.485.000.000	5.336.071.875	-148.928.125		pergeseran kode rekening belanja
						Jumlah Belanja	8.639.215.000	8.639.286.875	71.875		
		7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat									
7	1	7.01.0.00.0.00.05.	1	00.00	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.949.080.000	3.855.601.220	-93.478.780		
7	1	7.01.0.00.0.00.05.	1	02.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.145.900.000	2.879.711.220	-266.188.780		
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.145.000.000	2.878.811.220	-266.188.780		pergeseran kode rekening belanja
						Jumlah Belanja	4.516.105.000	4.422.626.220	-93.478.780		
		7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat									
7	1	7.01.0.00.0.00.06.	1	00.00	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.195.830.000	2.727.671.000	-468.159.000		
7	1	7.01.0.00.0.00.06.	1	02.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.455.900.000	1.937.741.000	-518.159.000		
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.455.000.000	1.936.841.000	-518.159.000		pergeseran kode rekening belanja
						Jumlah Belanja	3.360.805.000	2.892.646.000	-468.159.000		

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
						8.01.0.00.0.00.03.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Barat					
8	1	8.01.0.00.0.00.03.	1	00.00	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.784.255.750	2.972.929.730	188.673.980		
8	1	8.01.0.00.0.00.03.	1	02.06	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	402.245.750	538.945.650	136.699.900		
8	1	8.01.0.00.0.00.03.0	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.000.000	337.500.000	67.500.000		pergeseran kode rekening belanja
						Jumlah Belanja	7.010.875.250	19.065.046.100	12.054.170.850		
						PEMBIAYAAN	132.006.506.432	107.291.801.771	- 24.714.704.661		
						PENERIMAAN PEMBIAYAAN	132.006.506.432	107.291.801.771	- 24.714.704.661		
						Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	131.906.506.432	107.191.801.771	- 24.714.704.661		
						- Penghematan Belanja	-	-	-		
						Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100.000.000	100.000.000	-		
						- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	-	-	-		
						PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-		

Ka. OPD BPKAD

Kabag. Hukum

Sekretaris OPD BPKAD

Kabid. ANGGARAN

Perancang RU

BUPATIBANGKA BARAT,

SUKIRMAN